

TESIS

**POLITIK EKONOMI DAN KEUANGAN
PADA PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
PAMEKASAN PASCA PENERAPAN
GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM**



Oleh

Ridan Muhtadi

091614553015

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS EKONOMI ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

TESIS

**POLITIK EKONOMI DAN KEUANGAN
PADA PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
PAMEKASAN PASCA PENERAPAN
GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM**

Oleh

Ridan Muhtadi

091614553015

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS EKONOMI ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

**POLITIK EKONOMI DAN KEUANGAN
PADA PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
PAMEKASAN PASCA PENERAPAN
GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Ekonomi Islam
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga**

OLEH:

**RIDAN MUHTADI
091614553015**

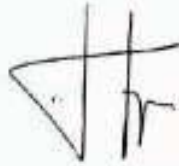
**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS EKONOMI ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIUJI DAN DISETUJUI
TANGGAL, 26 JULI 2018

Oleh

Pembimbing Ketua



Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si
NIP. 196902072008122001

Pembimbing Kedua



Dr. Irham Zaki, S.Ag., M.Ei.
NIP. 197508012008121061

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Sains Ekonomi Islam
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si
NIP. 196902072008122001

PENETEPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis ini telah diuji dan dinilai oleh Panitia Penguji Tesis Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 26 Juli 2018.

Panitia Penguji Tesis:

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Ririn Tri Ratnasari, S.E., M.SI |
| 2. Penguji I | : Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.SI |
| 3. Penguji II | : Dr. Irham Zaki, S.Ag., M.EI |
| 4. Penguji III | : Dr. Achsania Hendratmi, S.E., M.SI |
| 5. Penguji IV | : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ridan Muhtadi

NIM : 091614553015

Program Studi : Magister Sains Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penumpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Juli 2018



Ridan Muhtadi

091614553015

DECLARATION

The undersigned me:

Name : Ridan Muhtadi

NIM : 091614553015

Study Program: Master of Islamic Economic Science

declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Universitas Airlangga or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References
3. This statement is true; if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and regulations in Airlangga University.

Surabaya, 20 Juli 2018



Ridan Muhtadi

091614553015

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Pembuka tabir segala rahasia, Maha memudahkan segala kesukaran, Maha mengganti kecemasan dengan kesejukan jiwa, Maha mengajari segala pengetahuan, hanya dengan kasih dan tuntunan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Politik Ekonomi dan Keuangan pada Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Pasca Penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah sebagai proklamator Islam, serta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Motivasi penuh kegigihan untuk mewujudkan tulisan ini telah didapatkan oleh penulis dari berbagai pihak, tak ada kata yang tepat untuk disampaikan oleh penulis kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Abi Drs. H. Moh. Shadik Tayyib, M.Ag dan Ummi H. Sumijati, BA yang selalu memberikan curahan do'a, cinta, kasih sayang, dan semangat kepada ananda untuk selalu menjadi anak yang sholeh dan senantiasa berbakti kepada orangtua dan keluarga. Saudaraku tercinta Bang Brow Hadiatur Rahman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis disetiap saat. Pada kesempatan berikutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA. Selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak., selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga
3. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes dan Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.H., selaku Wakil Direktur I dan II Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan support dan bimbingannya dalam menempuh studi strata dua di program studi Magister Sains Ekonomi Islam serta berproses dalam pengembangan diri di Himpunan Sekolah Pascasarjana (HIMASEPA) periode 2016-2017.
4. Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si., selaku pembimbing pertama tesis dan sebagai Ketua Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan bimbingan pengetahuan, pengalaman dan motivasi pada penulis agar selau bisa melakukan yang terbaik.
5. Dr. Irham Zaki, S.Ag, M.EI selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini sekaligus yang memberikan dukungan terbaik kepada penulis dikala menempuh pendidikan di Universitas Airlangga.
6. Semua Dosen Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam, Dr. Nafik HR, Dr. Ari Prasetyo, Dr. Imron Mawardi, Prof. Tjiptohadi, dan dosen dosen lainnya yang telah memberikan suatu perubahan dalam ilmu dan perbuatan yang lebih terarah.
7. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kholilurrahman, M.SI selaku Bupati Kab Pamekasan periode 2008-2013, Bapak Agus Qomarullah selaku Kasubag Kepemerintahan BAPPEDA Kab. Pamekasan dan Bapak Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag selaku Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerepan Syariat Islam (LP2SI) Kab. Pamekasan yang telah menerima dengan sepenuh hati peneliti. Sehingga dengan keramah tamahan ini

- menepiskan paradigma bahwasanya tidak sepenuhnya segenap lembaga pemerintahan di Pamekasan menutup diri konsultasi dan saran demi pengembangan Kab. Pamekasan.
8. Ibu Sis, Ibu Ul, Bapak Dani, Bapak Suyatno, Bapak Sungkono dan Om Supadno, beserta staf-staf di Sekolah Pascasarjana yang selalu melayani sepenuh hati setiap administrasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan proses studi.
 9. Prof. Heri Purnobasuki, Ph.D., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) dan beberapa peneliti yaitu Dimas Agung T, S.IP., M.PSDM., Moh. Arifin, S.El., Cand.M.SEI., Taufiq Nugroho, S.E., Cand.M.SEI., Muzakki, S.M., Cand.M.SM., Sonny Fajar, S.E., serta beberapa teman-teman Enumerator yang telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis dalam berproses improvisasi skil penelitian sebagai peneliti muda. Terimakasih sebesar-besarnya telah menjadi bagian dari keluarga penulis ditanah rantau.
 10. Prof. Muhammad Syukri Salleh, Ph.D., Prof. Dr. Zakaria Bahari., Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi, dan beberapa Sahabat di *Center for Islamic Development Management Studies (ISDEV)* Universitas Sains Malaysia Seperti Kakak Dr. (Cand) Nurul Suhada Ismail yang telah banyak memberikan saran dalam diskusi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta support referensi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan studi.
 11. Teman- teman seperjuangan selama menempuh pendidikan strata dua ekonomi islam (MSEI 2016) *ter-hits*, Abah Hasyim, Mbakyu Amel, Mbakyu Fitry, Mas Aga, Bro Denizar, Bro Haris, Bor Haris dan seluruh Mahasiswa S2 Sains Ekonomi Islam angkatan 2011 yang sudah memberikan bantuan dan semangat untuk peneliti.
 12. Dan Para Senior di Tim Tenaga Ahli Menteri Sosial 2014-2018 Mas Dwiari Kusuma, Mas Nova Haryanto, Mas Jairi Irawan, dan Mas Zulfahmi Wahab yang telah mengajari penulis untuk bisa *survive & Seattle* dalam menjalani proses pendewasaan diri. Beserta Beberapa Senior di Madura Idea Foundation yaitu Ra Fudholi, Ra Zainal, Ra Ulhaq, Mas Agung, Mas feri, Mas Anam, Mas Adi, Mas Firman dan lainnya yang tak mampu penulis sebut satu per-satu
 13. Adik-adik Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah (HIMAESYA) & Forum Riset dan Kajian Ekonomi Syariah (FoRKiES) yang akan selalu berpegang teguh dalam nilai-nilai DAKWAH, UKHUWAH, ILMIAH disetiap deru nafas sebagai kader Ekonom Robbani. Ekonom Robbani!! Bisa. Ekonomi Syariah!! Jaya. Himaesya!! Luar Biasa.

Pada akhirnya penulis berkeyakinan bahwa masih banyak pihak yang dengan tulus akan memberikan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang mempelajarinya. Amien.

Surabaya, 20 Juli 2018
Penulis

Ridan Muhtadi
091614553015

RINGKASAN

POLITIK EKONOMI DAN KEUANGAN

PADA PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PASCA PENERAPAN

GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM

Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 merupakan oase baru bagi perjuangan demokrasi di Indonesia. Salah satu arus balik gerakan reformasi yang bisa disaksikan saat ini, selain kembalinya kekuatan Orde Baru dan militer dalam panggung politik, juga maraknya gerakan formalisasi syariat Islam di berbagai daerah. Gerakan untuk formalisasi syariat Islam itu di dasari atas mayoritasnya umat Muslim di Indonesia. Indonesia sebagai mayoritas penduduknya menganut Agama Islam. Sehingga banyak pemerintah daerah di Indonesia yang berani menerapkan syariat islam atas dasar otonomi daerah.

Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah berdasarkan penjelasan Pemerintahan Daerah yang lebih kecil. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Diterbitkannya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan didaerahnya.

Jawa timur termasuk di dalam daftar provinsi yang pemerintah kabupaten atau kotanya menerapkan Perda Syariah. Jawa Timur sebagai daerah regional yang banyak menerapkan peraturan daerah berbasis Agama salah satunya beberapa daerah di Madura yaitu Kabupaten Pamekasan. Masuknya Perda syariah atau yang lebih di istilahkan dengan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di kabupaten Pamekasan telah memberikan arus politik baru dan nuansa baru baik ditingkatan elit politik maupun masyarakat biasa, tidak hanya didataran hukum, namun simbol-simbol yang berbau Islam pun juga tampil kepermukaan dan bisa diakomodir secara baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat ketika menentukan kebijakan yang bersifat publik baik dibidang politik, Hukum, dan Ekonomi.

Analisis ekonomi politik terhadap Kebijakan peraturan daerah syariah di pamekasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan dengan motto Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) lahir bukan sekedar memandang absolutisme agama Islam semata, namun disana ada proses panjang yang melatarbelakangi kenapa agama dipandang perlu disandingkan dengan sistem hukum positif yang dipahami minim akan nilai-nilai susila, yang menjadi masalah utama di Kabupaten Pamekasan sekarang. Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan hanya berbentuk Himbauan dan sebuah Gerakan Kolektif tersebut juga termotivasi oleh lahirnya otonomi daerah yang sedikit memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pamekasan untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya atas dasar inilah kebijakan peraturan daerah yang telah ditetapkan atas dasar nilai maslahatan. Semua kebijakan peraturan daerah yang ditetapkan telah melalui proses yang didasari pada faktor ekonomi politik yang berlaku. Faktor yang pertama atas dasar pengaruh dari daerah lain yang juga sama-sama telah menerapkan peraturan daerah dan faktor kedua berdasarkan internal kondisi politik dan ekonomi yang ada di kabupaten Pamekasan.

SUMMARY

ECONOMIC AND FINANCIAL POLITICS IN REGIONAL GOVERNMENT PAMEKASAN REGENCY POST APPLICATION OF MOVEMENT OF ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT

The collapse of the New Order regime in 1998 was a new oasis for the democratic struggle in Indonesia. One of the backlashes of the reform movement that can be witnessed today, in addition to the return of the New Order and military forces in the political stage, also the rise of the Islamic shari'ah formalization movement in various regions. The movement for the formalization of the Islamic Shariah is based on the majority of Muslims in Indonesia. Indonesia as the majority of its population embraced Islam. So many local governments in Indonesia who dare to apply Islamic law on the basis of regional autonomy.

According to the Constitution of the 1945 Constitution, based on the explanation it is stated that the Indonesian territory will be divided into provinces and provinces will be divided into regions based on the explanations of the smaller Local Governments. According to the principle of autonomy and duty of assistance with the principle of autonomy as wide as possible in the system and principles of NKRI, as intended in the 1945 Constitution. The issuance of Law No. 23 of 2014 on Regional Government as the implementation of regional autonomy, the Regional Government has wide authority in the management in the area.

East Java is included in the list of provinces where the district government or city applies the Sharia Regulation. East Java as a regional area that many regulatory-based regional regulations one of them some areas in Madura is Pamekasan District. The introduction of Sharia regulations or more termed the Gate of Greetings (Islamic Community Development Movement) in Pamekasan district has given new political currents and new nuances both in the political elite and in ordinary society, not only in law but also in symbols of Islam appear on the surface and can be accommodated well by the government and local communities when determining policies that are public both in the field of politics, Law, and Economics.

Analysis of political economy on the policy of sharia regulation in pamekasan, it can be concluded that the application of Islamic law in Pamekasan Regency with the motto of Gerbang Salam (Islamic Community Development Movement) born not merely look at the absolutism of Islam alone, but there is a long process underlying why religion is viewed need to be juxtaposed with a positive legal system that is understood to be minimal to moral values, which is the main problem in Pamekasan district now. Salam Gate in Pamekasan District is only in the form of an Appeal and a Collective Movement is also motivated by the birth of regional autonomy which gives little flexibility to local governments to manage and manage their respective regions Policy undertaken by local government pamekasan district to support the welfare of its people on the basis of this policy regional regulations that have been established on the basis of the value of maslahatan. All established local regulations have gone through a process based on prevailing political economic factors. The first factor on the basis of the influence of other regions which also equally apply the local regulations and the second factor based on the internal political and economic conditions that exist in Pamekasan district.

ABSTRAK

**POLITIK EKONOMI DAN KEUANGAN
PADA PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
PASCA PENERAPAN
GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM**

Sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia yang mempunyai competitive advantage kuantitas penduduk Muslimnya melatarbelakangi lahirnya peraturan tersebut untuk menerapkan peraturan daerah syariah. Lantas, Apakah Masyarakat Muslim Indonesia akan mengalami keraguan dalam proses formalisasi syariat islam di daerah. Sebab peningkatan kesadaran akan formalisasi syariat islam notabenenya merupakan bentuk kewajiban agama dan untuk mencapai falah. Justru berdasarkan beberapa faktor dilapangan itulah yang menggugah rasa agar maslahat tercipta di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan penedekatan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang ada adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian analisis ekonomi politik terhadap Kebijakan peraturan daerah syariah di pamekasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan dengan motto Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) lahir bukan sekedar memandang absolutisme agama Islam semata, namun disana ada proses panjang yang melatarbelakangi kenapa agama dipandang perlu disandingkan dengan sistem hukum positif yang dipahami minim akan nilai-nilai susila, yang menjadi masalah utama di Kabupaten Pamekasan sekarang. Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan hanya berbentuk Himbauan dan sebuah Gerakan Kolektif tersebut juga termotivasi oleh lahirnya otonomi daerah yang sedikit memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pamekasan untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Karena secara hakikatnya, pengeluaran belanja biaya di peruntukkan untuk kebutuhan publik atas dasar inilah kebijakan peraturan daerah yang telah ditetapkan atas dasar nilai maslahatan. Semua kebijakan peraturan daerah yang ditetapkan telah melalui proses yang didasari pada faktor ekonomi politik yang berlaku. Faktor yang pertama atas dasar pengaruh dari daerah lain yang juga sama-sama telah menerapkan peraturan daerah dan faktor kedua berdasarkan internal kondisi politik dan ekonomi yang ada di kabupaten Pamekasan

Kata Kunci: Politik Ekonomi dan Keuangan, Peraturan Daerah, Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam

ABSTRACT

ECONOMIC AND FINANCIAL POLITICS IN REGIONAL GOVERNMENT PAMEKASAN REGENCY POST APPLICATION OF MOVEMENT OF ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT

Since the issuance of Law no. 23 of 2014 concerning Local Government, Indonesia which has competitive advantage of its population quantity of Moslems behind the birth of the regulation is to apply syariah regulation. So, Will Muslim Society of Indonesia will experience doubts in the formalization process of Islamic syariat in the region. For increased awareness of the formalization of Islamic syariat notabenenya is a form of religious obligations and to achieve falah. Precisely based on several factors in the field that inspires a sense of maslahat created in the community. The research method used is the normative juridical method with the approach of legislation. The analytical method used to solve existing legal problems is qualitative jurisdiction. The result of research of political economy analysis on policy of syariah regulation in pamekasan, can be concluded that the application of Islamic law in Pamekasan Regency with the motto of Gerbang Salam (Islamic Community Development Movement) born not merely look at absolutism of Islam only, but there is a long process underlying why religion is considered necessary to be juxtaposed with a positive legal system that is understood to be minimal to moral values, which is the main problem in Pamekasan Regency now. Salam Gate in Pamekasan District is only in the form of an Appeal and a Collective Movement is also motivated by the birth of regional autonomy which gives little flexibility to local government to manage and manage their respective regions. Policies undertaken by the district government pamekasan to support the welfare of its people. Because essentially, the local regulations that have been set in designation for public needs on the basis of this policy of local regulations that have been established on the basis of value maslahatan. All established local regulations have gone through a process based on prevailing political economic factors. The first factor on the basis of the influence of other regions that have also equally applied the local regulations and the second factor based on the internal political and economic conditions that exist in the district Pamekasan

Keywords: Political Economy and Finance, Regional Regulation, Islamic Community Development Movement

المخلص

الاقتصاد السياسي والتمويل على التنظيم الإقليمي لتنفيذ حكومة ما بعد حركة تنمية المجتمع الإسلامي

منذ صدور القانون لا. 23 من 2014 على الحكومة الإقليمية ، أندونيسيا التي تتمتع بميزة تنافسية من كية سكانها المسلمين وراء ولادة التنظيم لتطبيق قواعد الشريعة. هل ستواجه جمعية المسلمين في إندونيسيا شكوكاً في عملية إضفاء الطابع الرسمي على السياسة الإسلامية في المنطقة. لأن زيادة الوعي بإضفاء الطابع الرسمي على الشريعة الإسلامية هو في الواقع شكل من أشكال الواجب الديني وتحقيق الازدهار. تستند بشكل دقيق على عدة عوامل في هذا المجال التي تلهم شعوراً من المصالحات التي تم إنشاؤها في المجتمع. طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة القانونية المعيارية مع نهج التشريع. الطريقة التحليلية المستخدمة لحل المشاكل القانونية القائمة هي الاختصاص النوعي. نتائج الدراسة تحليلات، فإنه يمكن استنتاج الاقتصاد السياسي للسياسة وأنشء الشريعة المحلية في أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مقاطعة مع شعار بوابة السلام (الجمعية الإسلامية حركة التنمية) ولدت وليس فقط النظر في الحكم المطلق للإسلام في حد ذاته، ولكن هناك عملية طويلة وراء السبب ويقتن الدين لزم الأمر مع النظام القانوني الإيجالي الذي يفهم أن يكون الحد الأدنى من القيم الأخلاقية، التي أصبحت مشكلة رئيسية في الآن. والنافع وراء سلام البوابة في فقط على شكل الاستئناف وحركة الجماعة أيضاً ولادة الحكم الذاتي المحلي القليل من الحكومات المحلية لتوفير المزيد من المرونة لتنظيم وإدارة مناطقها. السياسات التي اتخذتها الحكومة المحلية لدعم رفاهية شعبها. لأنه في الجوهر ، فإن اللوائح المحلية التي تم تعيينها في تعيين الاحتياجات العامة على أساس هذه السياسة من الأنظمة المحلية التي تم تأسيسها على أساس قيمة الفائدة. لقد مرت جميع اللوائح المحلية المعمول بها في عملية تستند إلى الاقتصاد السياسي السائد. العامل الأول على أساس تأثير المناطق الأخرى التي نفذت على قدم المساواة اللوائح المحلية ويستند العامل الثاني على الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية التي توجد في الكليات المفتاحية: الاقتصاد السياسي والمالية ، التنظيم الإقليمي ، حركة تنمية المجتمع الإسلامي

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin.

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

No.	Arab	Latin	Keterangan
1	ا	-	Tidak dilambangkan
2	ب	B	-
3	ت	T	-
4	ث	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
5	ج	J	-
6	ح	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
7	خ	Kh	-
8	د	D	-
9	ذ	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
10	ر	R	-
11	ز	Z	-
12	س	S	-
13	ش	Sy	-
14	ص	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
15	ض	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
16	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
17	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
18	ع	'	koma terbalik terletak di atas

19	غ	G	-
20	ف	F	-
21	ق	Q	-
22	ك	K	-
23	ل	L	-
24	م	M	-
25	ن	N	-
26	و	W	-
27	ه/هـ	H	-
28	ء	‘	Apostrof
29	ي	Y	-

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syiddah* () ditulis rangkap.

Contoh: انه ditulis *innahu*

3. *Tā’marbūtah* di akhir kata

- 3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

- 3.2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: مكتبة الجامعة ditulis *maktabatu’l-jāmi’ah*

4. Vokal Panjang

Fathah (baris di atas) di tulis ā, *kasrah* (baris di bawah) di tulis ī, serta *dammah*

(baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; الناس ditulis *an-nās*.

5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-)

شيء قدير ditulis *syai-in qadīr*

6. Kata Sandang Alif+Lam

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam kata (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ', q, m, t) ditulis ditulis *al*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya.

7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya:

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik ('), sedangkan penghubung dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-).

بسم الله الرحمن الرحيم dibaca *bismi'l-Lāhi'r-rahmāni'r-rahīm*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA UJIAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DECLARATION	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
الخلاصة	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Keuangan Publik Islam	12
2.1.2 Perspektif Ekonomi Politik Islam	22
2.1.3 Kebijakan Pemerintah Sektor Publik	28
2.1.4 Penerapan Syariah Islam dalam Bingkai Otonomi	32
2.2. Penelitian Terdahulu	45
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
3.1. Kerangka Berpikir	53
3.2. Kerangka Konseptual	54
BAB 4 METODE PENELITIAN	

4.1. Pendekatan Penelitian	57
4.1.1. Desain Penelitian	57
4.1.2. Jenis dan Sumber Data	58
4.2. Metode Pengumpulan Data	59
4.3. Metode Analisis Data	59
BAB 5 HASIL PENELITIAN	
5.1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	61
5.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Pamekasan	61
5.1.2. Kondisi Demografi	63
5.1.3. Kondisi Keberagaman	64
5.1.4. Kondisi Sosio-Kultural Masyarakat Pamekasan	68
5.2. GERBANG SALAM Kabupaten Pamekasan	69
5.3. Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Ekonomi dan Keuangan Islam	77
BAB 6 PEMBAHASAN	
6.1. Dinamika Ekonomi Politik Kebijakan PERDA Syariah Pamekasan	87
6.2. Solusi Aplikatif Ekonomi Islam Pada Perda Ekonomi dan Keuangan ...	97
BAB 7 PENUTUP	
7.1. Simpulan	107
7.2. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	